

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anto, Dajan. (1986). *Pengantar Metode Statistik II*. Jakarta: LP3ES.
- Armen, Zulham, dkk. (2017). *Rekomendasi Pengembangan Perikanan Tangkap di Natuna dan Sekitarnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: Konstitusi Press.
- Bakrie, Conni Rahakundini. (2007). *Pertahanan Negara dan Postur TNI Ideal*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Bungin, Burhan. (2014). *Analisis Data Penelitian Kualitatif "Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi"*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Creswell, J. W. (2012). *Research Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2014). *Strategi Pertahanan Negara*. Jakarta.
- Liddell Hart, B. H. (1967). *Strategy*. London Faber, (2nd rev ed.).
- Marsetio. (2018). *Mengembalikan Kejayaan Maritim Indonesia*. Bogor: Universitas Pertahanan.
- Miles, M.B. & Huberman, M. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook Edition 3*. USA: Sage Publication. Terjemahan Tjetjep Rohindi, UI-Press.
- Octavian, A & Yulianto, B. (2014). *Budaya, Identitas & Masalah Keamanan Maritim*. Jakarta: Universitas Pertahanan Indonesia.
- Purnomo, Setiawan, Hari dan Zulkieflimansyah. (1996). *Manajemen Strategi; Sebuah Konsep Pengantar*. Jakarta: Lembaga Penerbit: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Pusat Data dan Informasi. (2016). *Buku Kelautan dan Perikanan dalam Angka Kabupaten Natuna*. Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Rahardjo, Satjipto. (2009). *Penegakan Hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis*. Cetak Kedua. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Soekanto, Soerjono. (2005). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: UI Press.

- Sudarto. (2010). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: PT. Alumni.
- Supandi, Ade. (2018). *Fondasi Negara Maritim*. Jakarta: Pustaka Nasution.
- Till, Geoffrey. (2004). *Seapower: A Guide for the Twenty-First Century*. London: Psychology Press.

Peraturan dan Perundangan

- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
- Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
- Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
- Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2023 tentang Landas Kontinen.
- Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2023 tentang Kebijakan Nasional Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia.
- Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Kebijakan Pengintegrasian Komponen pertahanan Negara.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.18/Permen-KP/2014 Tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Sistem, Manajemen dan Standar Keberhasilan Operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.50/MEN/2012 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan *Illegal, Unreported, And Unregulated Fishing* Tahun 2012-2016.

Tesis

- Ompusunggu, Demak. (2010). *Peran Polri Dalam Pemberantasan Praktek Illegal Fishing Di Wilayah Perairan Indonesia*. Universitas Sumatera Utara.

Jurnal

- Soemarmi, A, dkk. (2020). "Teknologi Vessel Monitoring System (VMS) Sebagai Strategi Perlindungan dan Pembangunan Indudtri Perikanan di Indonesia". *Masalah-Masalah Hukum* 49 nomor 3, hh. 303-313.
- Abdur, Abdul Qodir Jaelani dan Udiyo Basuki. (2014). "Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing: Upaya Mencegah dan Memberantas Illegal Fishing dalam Membangun Poros Maritim Indonesia". *Jurnal Supremasi Hukum*. Volume. 3, Nomor.1, h. 92.
- Arthur, F. Lykke Jr. (1989). "Defining Military Strategy". *Military Review*, Vol. 77, Number 1.
- Budiman, A dan Tjakrawidjaya. (2002). "Museum Zoologi dalam Penelitian dan Konservasi Hayati (Ikan)". *Jurnal Iktiologi Indonesia*. Volume 2, Nomor 2, hh. 51-55
- Bueger, Christian dan Edmunds, Timothy. (2017). "Beyond Seablindness: A New Agenda for Maritime Security Studies". *International Affairs* 93(6): 1293-1311. Doi 10.1093/ia/iix74, diakses pada 27 Desember 2023.
- Darmawijaya, A. S., Ras, A. R., & Wardoyo, B. (2022). "Illegal Fishing Di Laut Natuna Utara: Upaya Penanganan Illegal Fishing Serta Para Pelaku Setelah Tertangkap". *Jurnal Ilmiah Indonesia*. Volume 7, Nomor 1, h. 63.
- Isamuddin, N., dkk. (2021). "Peran Media Sosial Dalam Membangun Kesadaran Maritim Pada Generasi X, Milenial dan Z Di Era Digital". *Jurnal Kybernan*. Volume 12, Nomor 1, hh. 23-24.
- Ida, Kurnia. (2021). "Law Enforcement Against Illegal Fishing In Natuna Waters During The Covid-19 Pandemic". *Law Journal*. Vol. 3, Number 2.
- Jenifer, L. Enck. (2003). "The United Nations Convetion Againts Transnational Organized Crime: Is it All that is Cracked up tu be". *Syracus Journal of International Law*, Vol. 30, hh. 374–375.
- Ljulj., Slapnicar & Mihanovic. (2023). "Concept Design of Hybrid Offshore Patrol Vessel". *Journal of Marine Science and Engineering*. Volume 11, Nomor 12.
- Martin, A., & Santya, D. S. (2023). "Strategi Penanganan Keamanan Maritim Indonesia; Studi Kasus Penanganan Illegal, Unregulated, And Unreported Fishing Di Indonesia Tahun 2014-2019". *SPEKTRUM*. Volume 20, Nomor 1, hh. 95-107.

- Medendehe, R.J. (2021). "Penanganan Pelanggaran Hukum Di Zona Ekonomi Eksklusif Perairan Natuna". *Lex Et Societatis*. Volume IX, Nomor 1, hh. 13-20.
- Purwanto, Harry. (2014). "Rute Penerbangan Di Atas Alur Laut Kepulauan; Perspektif Indonesia". *Perspektif Hukum*, Volume 14, Nomor 1, hh. 1–17.
- Roell, et.al. (2013). "Maritime Security: Perspective for A Comprehensive Approach". *ISPSW No 222 2 dalam jurnal ISPSW Strategies Series: Focus on Defense and International Security*. Nomor 222.
- Rohana, U. (2022). "Interoperabilitas TNI AL Dan Bakamla RI Dalam Melaksanakan Kegiatan Pengawasan Terhadap Pelanggaran Di Wilayah Laut Natuna Utara". *Journal of Industrial Engineering & Management Research*. Volume 3, Nomor 4.
- Sartono, dkk. (2021). "Kebijakan Pemerintah Dalam Upaya Penanganan Illegal Fishing Dalam Sudut Pandang Pertahanan Negara Di Laut". *Jurnal Universitas Pertahanan*, Strategi Pertahanan Laut.
- Setiawan, A. (2017). "Keamanan Maritim di Laut Cina Selatan: Tinjauan atas Analisa Barry Buzan". *Jurnal Keamanan Nasional*. Nomor 3, hh. 33–62.
- Sutardjo, S. C. (2014). "Kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan ke Depan Developmen Policy of Marine And Fisheries". *Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia*. Volume 6, Nomor 1, hh. 37–42.
- Sugihartono, (2018). "Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Dalam Poros Maritim dan Tol Laut". *Jurnal Sains dan Teknologi Maritim*. Volume 18, Nomor 1.
- Vladan Holcner & Drazen Smiljanic, 2018. "Sustainability of Defense Sector and Stability of defense expenditure. 22nd International Conference Current Trends In Public Research" Brno: Faculty of Economic and Administration Departement of Public Economic, Masaryk University, p. 124-131.
- Zeng X., Jiao J., Li C. (2022). "Study on The Influence of Artillery Recoil on The Lateral Stability of Patrol Boat". *Journal of Physics*. doi:10.1088/1742-6596/2381/012112.

Website dan Sumber Lainnya

- Bueger, Christian. 2015. "What is Maritime Security?" *Marine Policy* 53: 159-164. Retried from <http://bueger.info/wp-content/uploads/2014/12/Bueger-2014-What-is-Maritime-Security-final.pdf>. Diakses pada 20 November 2023.
- Jdih.maritim.go.id. UU16/23: Landas Kontinen. Diakses tanggal 1 Oktober 2023.

- Jimly.com. "Makalah Penegakan Hukum". Retrieved from http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf. Diakses tanggal 27 November 2022.
- Kompas.Com. "Negara Merugi RP 30 Triliun Tiap Tahun Akibat Pencurian Ikan di Natuna". Diakses 24 Maret 2023.
- Kemenkeu.go.id. "Buletin Inti PNBPN Edisi 6 Tahun 2021". Diakses tanggal 28 November 2022.
- Liputan6.Com. "Berbagai Modus Pencurian Ikan Di Indonesia. Diakses pada 15 Maret 2023.
- Nurhakim, Rochman. (2021). "Menakar illegal fishing di zona ekonomi eksklusif Indonesia (ZEEI). Retrieved from <https://kkp.go.id/setjen/perpustakaan/artikel/37852-makalah-menakar-illegal-fishing-di-zona-ekonomi-eksklusif-indonesia-zeei>. Diakses 22 Maret 2023.
- Saksono, Pung Nugroho. "Tantangan Pengawasan Perikanan di Perbatasan, 2020". <https://www.youtube.com/watch?v=e1-bgSyVTL0>/diakses/8/10/2022.